

Bab 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan hal yang wajib dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota. Hal itu juga berlaku untuk setiap SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota. Lapkin adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Secara khusus, dalam mewujudkan *good government* dan *clean government*, penerapan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja, dimana laporan kinerja tersebut memiliki dua fungsi penting, yaitu : (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen. Kedua fungsi tersebut memberikan arah bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5,6,7,8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan berdasarkan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Secara struktural Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II), yang pada tingkat eselon III dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu : (1) Sub Bagian Penyusunan Program; (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Minyak dan Gas Bumi membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi; (2) Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi; dan (3) Seksi K3 dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.
3. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Inventarisasi Sumberdaya Mineral; (2) Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Geologi Kelautan; dan (3) Seksi Laboratorium dan Peralatan Survey.
4. Bidang Pertambangan Umum membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Pembinaan dan Pelayanan Perijinan; (2) Seksi Pengawasan dan Evaluasi; dan (3) Seksi Bimbingan Teknis dan Penataan Wilayah.
5. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi; (2) Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan (3) Seksi Bimbingan Teknis Konservasi Energi.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2013 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pertambangan dan energi sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan pertambangan umum, migas, kelistrikan dan energi;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan geologi dan sumber daya mineral, usaha pertambangan umum, migas, kelistrikan dan energi;
4. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas pertambangan dan energi dalam pelaksanaan tugasnya melalui diklat teknis reguler dan fungsional; dan
5. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Pertambangan dan Energi.

D. LINGKUP STRATEGIS

Sektor pertambangan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat diunggulkan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Hal ini mengingat kontribusi dan perannya yang semakin

besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu semenjak sektor pertambangan dan energi dirancang, dilaksanakan serta diawasi secara terprogram dan sistematis.

Kalimantan Tengah menawarkan kesempatan bagi penambangan jenis bahan galian seperti batubara, emas, intan, bijih besi, zircon, tembaga, perak gambut, kaolin pasir kuarsa dan masih banyak lainnya yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Dari hasil penyelidikan umum yang telah dilaksanakan dapat diprediksi bahwa sektor pertambangan dan energi mempunyai potensi yang cukup besar dalam mendukung program pembangunan di masa mendatang.

Secara khusus Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui instansi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kewenangan dibidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi, di bidang Pertambangan dan Energi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Bab 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2016.

A. VISI

Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah merumuskan visi sebagai berikut :

Terwujudnya pembangunan sektor pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sejalan dengan falsafah "HUMA BETANG"

Pernyataan visi di atas menunjukkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah berkeinginan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera sebagaimana amanat yang tertuang didalam Undang-undang Dasar 1945, yang harus dapat terwujud melalui pembangunan dalam bidang pertambangan dan energi.

Adapun tujuan penetapan visi tersebut adalah : (1) Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah; (2) Memberi arah dan fokus strategi yang jelas; dan (3) Memiliki orientasi terhadap masa depan.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Pertambangan dan Energi menetapkan misi sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pertambangan bagi penerimaan daerah dengan tetap mempertimbangkan "pertambangan yang baik dan benar".
2. Penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan bagi masyarakat yang ramah lingkungan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas informasi sumberdaya mineral, batubara, minyak dan gas bumi, air tanah, geologi lingkungan dan kelautan.
4. Meningkatkan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas serta monitoring kewajiban pada lembaga penyalur.
5. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan pusat.

C. TUJUAN

Sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas, maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sektor pertambangan dan energi .
2. Tersedianya sarana ketenagalistrikan yang bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan .
3. Tersedianya informasi sumberdaya mineral, batubara, minyak dan gas bumi, air tanah, geologi lingkungan dan kelautan yang berkualitas.
4. Tersedianya dan terdistribusinya Bahan Bakar Minyak dan gas.
5. Tersinkronisasinya program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

D. SASARAN

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal.
2. Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat.
3. Meningkatnya investasi sektor pertambangan dan energi
4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak.
5. Mewujudkan Pertambangan Minerba yang Baik dan Benar atau Good Mining Practice (GMP).

E. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan strategi berikut ini :

1. Memelihara dan meningkatkan kontribusi mineral dan batubara bagi penerimaan negara dan daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip konservasi.
2. Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai energi alternative.
3. Meningkatkan promosi dalam rangka mengembangkan usaha pertambangan, ahli teknologi dan meningkatkan sumber daya manusia.
4. Meningkatkan pasokan bahan bakar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Pemerintah.
5. Terlaksananya Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Persyaratan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Benar atau Good Mining Practice (GMP)

F. KEBIJAKAN

Strategi tersebut di atas dilaksanakan didukung oleh kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam informasi sumber daya mineral, batubara dan air tanah, serta pengenalan daerah-daerah berpotensi sumber daya tersebut melalui peningkatan profesional dan akuntabilitas.
2. Mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui penyediaan tenaga listrik yang cukup, efisien, harga yang wajar, andal, aman dan berwawasan lingkungan lingkungan, serta penyempurnaan aturan dan mekanisme partisipasi swasta yang lebih efisien.
3. Mengoptimalkan sumberdaya mineral dan batubara dalam upaya meningkatkan devisa, pengembangan dan penciptaan nilai tambah.
4. Mengoptimalkan pasokan Bahan Bakar Minyak sesuai kebutuhan masyarakat
5. Mengoptimalkan kerjasama pembangunan bidang pertambangan dan energi antara pusat dan daerah.

G. PROGRAM

Program Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

Selama periode tahun 2016 Dinas Pertambangan dan Energi telah melaksanakan program dalam bidang pertambangan dan energi yang langsung menyentuh ke masyarakat. Adapun program yang dimaksud adalah :

1. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
3. Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas.
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi.
5. Program Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan.
6. Program Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilyah Pertambangan.
7. Program Pengusahaan Listrik dan Energi.
8. Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.
10. Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi.
11. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium.
12. Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan.

H. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap program atau kegiatan dalam Rencana Strategis kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Bidang/Sektor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bidang Pertambangan dan Energi	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Sumber Daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan • Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Pertambangan
	2. Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Bagi Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS Tersebar) • Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS Terpusat) • Jumlah Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa • Jumlah FS dan DED Bersumber dari Energi Baru Terbarukan • Jumlah Terbangunan Instalasi Biogas

	3. Meningkatnya Investasi Sektor Pertambangan dan Energi.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Nilai Investasi Meningkat Berdasarkan RKAB.
	4. Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Bahan Bakar Minyak dan Gas .	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kuota BBM dan LPG 3 kg • Jumlah SK HET BBM dan LPG • Jumlah Lokasi SPDN
	5. Terlaksananya Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Persyaratan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Benar atau Good Mining Practice (GMP)	Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Kaidah Teknis GMP

TABEL 2.2
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016

Sasaran Tahun 2016	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian IKU 2016
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Yang Ber-Basis Sumber Daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan • Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 420.000.000,- • Rp. 202.847.950.499,78 • Rp. 1.447.177.660.086,64
Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Bagi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS Tersebar) • Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS Terpusat) • Jumlah Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa • Jumlah FS dan DED Bersumber dari Energi Baru Terbarukan • Jumlah Terbangunannya Informasi Biogas 	<ul style="list-style-type: none"> • 22 Desa • 3 Desa • 6 Peta • 2 Dokumen • 1 Paket
Meningkatnya Investasi Sektor Pertambangan	Persentase Nilai Investasi Meningkat Berdasarkan RKAB	Rp. 2.208.422.989.681,- Us \$ 82.365.015
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Bahan Bakar Minyak Dan Gas	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kuota BBM dan LPG 3 kg • Jumlah SK HET BBM dan LPG • Jumlah Lokasi SPDN 	<ul style="list-style-type: none"> • 15725 KL BBM dan 44013 Tabung LPG 3 kg • 6 SK HET BBM dan LPG • 2 Usulan Lokasi SPDN
Terlaksananya Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Persyaratan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Benar atau Good Mining Practice (GMP)	Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Kaidah Teknis GMP	1.007 IUP yang memenuhi CNC

J. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 420.000.000,- Rp. 202.847.950.499,78 Rp. 1.447.177.660.086,64 	1. Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan.	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan Perizinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara Pembinaan Perizinan IUP dan IUPK Mineral Bukan Logam dan Batubara Sosialisasi Peluang Usaha Jasa Pertambangan (IUIP) Non Inti Bagi Perempuan Pra Rapat Kerja Pertambangan 	178.000.000,00 48.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
			2. Peningkatan Kapasitas Laboratorium.	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengadaan Reagen Pengadaan Peralatan Ukur dan Survey 	426.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 381.000.000,00
2. Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS Tersebar) Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS Terpusat) Jumlah Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa Jumlah FS dan DED Bersumber dari Energi Baru Terbarukan Jumlah Terbangunannya Informasi Biogas 	<ul style="list-style-type: none"> 25 Desa 3 Desa 6 Peta 3 Dokumen 3 Paket 	3. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (Pembangunan PLTS) Pembangunan TJR dan TJM Pemeliharaan dan Pembenahan PJU dan JTM Survey Energi Listrik dan Limbah Cair Kelapa Sawit Penyediaan Sarana dan Prasarana Listrik Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Hari-hari Besar di Lokasi Pameran Tilung Rapat dan Koordinasi Ralam Rangka Rintisan Pembangunan PLTU Mulut Tambang dan Penyaluran Melalui Jaringan Listrik Kabel Bawah Laut Lintas Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Jawa Tengah Verifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Listrik Desa Dengan Sumber Energi Baru Terbarukan Pembuatan Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa Sosialisasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan PLTS Pemeriksaan dan Serah Terima Pelaksanaan Pembangunan PLTS Pembangunan PLTS Terpusat Pembangunan Instalasi Bio Gas Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat 1 MW Yang Bersumber dari APBD 	23.916.630.000,00 9.442.450.000,00 1.340.000.000,00 300.000.000,00 80.000.000,00 86.000.000,00 400.000.000,00 271.000.000,00 180.000.000,00 355.000.000,00 230.000.000,00 8.835.687.000,00 1.374.043.000,00 562.450.000,00 460.000.000,00
			4. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.	<ol style="list-style-type: none"> Pra Rapat Kerja Kelistrikan Sosialisasi Penghematan Energi Listrik 	75.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00

			5. Pengusahaan Listrik dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV 2. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan 3. Sosialisasi Pembangunan Jaringan Traansmisi Tegangan Tinggi 150 KV 	<p>225.000.000,00 75.000.000,00</p> <p>90.000.000,00</p> <p>60.000.000,00</p>
3. Meningkatnya investasi sektor pertambangan dan energi	Persentase Nilai Investasi Meningkat Berdasarkan RKAB	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 2.208.422.989.681,- Us \$ 82.365.015 	6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Pameran Dagang dan Promosi	<p>207.000.000,00 207.000.000,00</p>
4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak dan gas	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kuota BBM dan LPG 3 kg • Jumlah SK HET BBM dan LPG • Jumlah Lokasi SPDN 	<ul style="list-style-type: none"> • 15725 KL BBM dan 44013 Tabung LPG 3 kg • 6 SK HET BBM dan LPG • 2 Usulan Lokasi SPDN 	7. Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Tata Niaga BBM dan LPG 2. Monitoring dan Evaluasi HET BBM dan LPG 3. Inventarisasi Calon Lokasi Pembangunan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan 4. Monitoring Penggunaan BBM Non Subsidi 	<p>335.000.000,00 50.000.000,00</p> <p>150.000.000,00</p> <p>60.000.000,00</p> <p>75.000.000,00</p>
5. Terlaksananya kegiatan Pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar atau good Mining Practice (GMP)	Persentase pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi kaidah GMP	100 % atau 400 Pemegang IUP yang mendapat CNC	8. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan.	Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	<p>351.000.000,00 351.000.000,00</p>
			9. Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peta Penataan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan 2. Penyusunan Peta Penataan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara 	<p>144.000.000,00 72.000.000,00</p> <p>72.000.000,-</p>
			10. Peningkatan Informasi Bidang Geologi.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Air Tanah 2. Evaluasi dan Pembinaan Perizinan Air Tanah 3. Pemetaan Hidrologi Skala 1:100.000 4. Pembuatan Sumur Pantek/Dangkal di Daerah Rawan Bencana Kebakaran 	<p>410.000.000,00 50.000.000,00</p> <p>60.000.000,00</p> <p>200.000.000,00</p> <p>100.000.000,00</p>
			11. Peningkatan Kualitas aan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Sebaran Bahan Galian 2. Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara 3. Inventarisasi Potensi WPR 	<p>340.000.000,- 78.000.000,00</p> <p>60.000.000,00</p> <p>202.000.000,00</p>
			12. Monitoring dan evaluasi program.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2. Rapat Kerja Pertambangan dan Energi 	<p>306.000.000,00 156.000.000,00</p> <p>150.000.000,00</p>

Jumlah total anggaran program Prioritas tahun 2016 adalah Rp. 26.913.630.000,- (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Program Prioritas:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp. 207.000.000,-
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Rp. 75.000.000,-
3. Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas
Rp. 335.000.000,-
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi
Rp. 340.000.000,-
5. Program Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan
Rp. 178.000.000,-
6. Program Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan
Rp. 144.000.000,-
7. Program Pengusahaan Listrik dan Energi
Rp. 225.000.000,-
8. Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Rp. 23.916.630.000,-
9. Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi
Rp. 410.000.000,-
10. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium
Rp. 426.000.000,-
11. Monitoring dan Evaluasi Program
306.000.000,-
12. Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan
Rp. 351.000.000,-

Namun Jumlah total anggaran program Prioritas tahun 2016 adalah Rp. 26.913.630.000,- (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) mengalami perubahan menjadi Rp. 21.335.929.500,- (Dua Puluh Satu

Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

TABEL 2.4
TABEL PERUBAHAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Sasaran Stragetis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Perubahan Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 420.000.000,- Rp. 202.847.950.499,78 Rp. 1.447.177.660.086,64 	1. Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan.	1. Pembinaan Perizinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara 2. Pembinaan Perizinan IUP dan IUPK Mineral Bukan Logam dan Batubara 3. Sosialisasi Peluang Usaha Jasa Pertambangan (IUIP) Non Inti Bagi Perempuan 4. Pra Rapat Kerja Pertambangan	167.838.500,00 45.600.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 42.238.500,00
			2. Peningkatan Kapasitas Laboratorium.	1. Pengadaan Peralatan Laboratorium 2. Pengadaan Reagen 3. Pengadaan Peralatan Ukur dan Survey	381.000.000,00 0,00 0,00 381.000.000,00
2. Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS Tersebar) Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS Terpusat) Jumlah Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa Jumlah FS dan DED Bersumber dari Energi Baru Terbarukan Jumlah Terbangunannya Informasi Biogas 	<ul style="list-style-type: none"> 22 Desa 3 Desa 6 Peta 2 Dokumen 1 Paket 	3. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.	1. Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (Pembangunan PLTS) 2. Pembangunan TJR dan TJM 3. Pemeliharaan dan Pembenahan PJU dan JTM 4. Survey Energi Listrik dan Limbah Cair Kelapa Sawit 5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Listrik Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Hari-hari Besar di Lokasi Pameran Tilung 6. Rapat dan Koordinasi Ralam Rangka Rintisan Pembangunan PLTU Mulut Tambang dan Penyaluran Melalui Jaringan Listrik Kabel Bawah Laut Lintas Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Jawa Tengah 7. Verifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Listrik Desa Dengan Sumber Energi Baru Terbarukan 8. Pembuatan Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa 9. Sosialisasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan PLTS 10. Pemeriksaan dan Serah Terima Pelaksanaan Pembangunan PLTS 11. Pembangunan PLTS Terpusat 12. Pembangunan Instalasi Bio Gas 13. Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat 14. Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat 1 MW Yang Bersumber dari APBD	18.687.858.700,00 7.502.750.000,00 0,00 300.000.000,00 80.000.000,00 76.000.000,00 0,00 270.307.000,00 180.000.000,00 309.221.100,00 185.688.600,00 8.883.647.000,00 286.990.000,00 562.450.000,00 0,00
			4. Pembinaan dan		18.920.000,00

			Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.	1. Pra Rapat Kerja Kelistrikan 2. Sosialisasi Penghematan Energi Listrik	18.920.000,00 0,00
			5. Pengusahaan Listrik dan Energi	1. Monitoring Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV 2. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan 3. Sosialisasi Pembangunan Jaringan Traansmisi Tegangan Tinggi 150 KV	225.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00
3. Meningkatnya investasi sektor pertambangan dan energi	Persentase Nilai Investasi Meningkat Berdasarkan RKAB	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 2.208.422.989.681,- Us \$ 82.365.015 	6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Pameran Dagang dan Promosi	138.071.000,00 138.071.000,00
4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak dan gas	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kuota BBM dan LPG 3 kg Jumlah SK HET BBM dan LPG Jumlah Lokasi SPDN 	<ul style="list-style-type: none"> 15725 KL BBM dan 44013 Tabung LPG 3 kg 6 SK HET BBM dan LPG 2 Usulan Lokasi SPDN 	7. Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas.	1. Monitoring Tata Niaga BBM dan LPG 2. Monitoring dan Evaluasi HET BBM dan LPG 3. Inventarisasi Calon Lokasi Pembangunan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan 4. Monitoring Penggunaan BBM Non Subsidi	323.601.000,00 47.626.000,00 140.975.000,00 60.000.000,00 75.000.000,00
5. Terlaksananya kegiatan Pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar atau good Mining Practice (GMP)	Persentase pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi kaidah GMP	100 % atau 400 Pemegang IUP yang mendapat CNC	8. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan.	Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	351.000.000,00 351.000.000,00
			9. Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan.	1. Penyusunan Peta Penataan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan 2. Penyusunan Peta Penataan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara	144.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,-
			10. Peningkatan Informasi Bidang Geologi.	1. Inventarisasi Pemanfaatan Air Tanah 2. Evaluasi dan Pembinaan Perizinan Air Tanah 3. Pemetaan Hidrologi Skala 1:100.000 4. Pembuatan Sumur Pantek/Dangkal di Daerah Rawan Bencana Kebakaran	406.030.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 200.000.000,00 96.030.000,00
			11. Peningkatan Kualitas aan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas	1. Pemetaan Sebaran Bahan Galian 2. Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara 3. Inventarisasi Potensi WPR	336.611.000,- 74.611.000,00 60.000.000,00 202.000.000,00

			Bumi.		
			12. Monitoring dan evaluasi program.	1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2. Rapat Kerja Pertambangan dan Energi	156.000.000,00 156.000.000,00 0,00

Jumlah total perubahan anggaran prioritas menjadi Rp. 21.335.929.500,- (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Program Prioritas :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp. 138.071.000,-
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Rp. 18.920.000,-
3. Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Minyak dan Gas
Rp. 323.601.000,-
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi
Rp. 336.611.000,-
5. Program Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan
Rp. 167.838.500,-
6. Program Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan
Rp. 144.000.000,-
7. Program Perusahaan Listrik dan Energi
Rp. 225.000.000,-
8. Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Rp. 18.687.858.000,-
9. Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi
Rp. 406.030.000,-
10. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium
Rp. 381.000.000,-
11. Monitoring dan Evaluasi Program
156.000.000,-
12. Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan
Rp. 351.000.000,-

Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dibuat juga dengan maksud sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Dengan demikian pengukuran kinerja kegiatan dibuat sebagai alat untuk menganalisa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

Secara umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan proposional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pertambangan dan Energi. Pencapaian Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2016 merupakan bagian dari kontribusi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 secara umum menunjukkan hasil yang relatif baik dalam capaian tujuan dan sasaran, walaupun pada kenyataan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan.

Tabel 3.1
PENGUKURAN HASIL CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DALAM TAHUN 2016

Sasaran Tahun 2016	Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Yang Ber-Basis Sumber Daya Lokal	• Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan	• Rp. 420.000.000,-	• Rp. 420.140.000,-	100,03 %
	• Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba	• Rp. 202.847.950.499,78 • Rp. 1.447.177.660.086,64	• Rp. 43.220.931.473 • Rp. 627.690.247.835	21,37 % 43,37 %
Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Bagi Masyarakat	• Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS Tersebar)	• 22 Desa	• 22 Desa	100 %
	• Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS Terpusat)	• 3 Desa	• 3 Desa	100 %
	• Jumlah Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa	• 6 Peta	• 6 Peta	100 %
	• Jumlah FS dan DED Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	• 2 Dokumen	• 2 Dokumen	100 %

	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Terbangunannya Informasi Biogas 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Paket 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Paket 	
Meningkatnya Investor Sektor Pertambangan	Persentase Nilai Investasi Meningkat Berdasarkan RKAB	Rp. 2.208.422.989.681,- Us \$ 82.365.015	Rp. 103.640.561.877 Us \$ 15.008.392	4,7 % 18,5 %
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Bahan Bakar Minyak Dan Gas	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kuota BBM dan LPG 3 kg • Jumlah SK HET BBM dan LPG • Jumlah Lokasi SPDN 	<ul style="list-style-type: none"> • 15725 KL BBM dan 44013 Tabung LPG 3 kg • 6 SK HET BBM dan LPG • 2 Usulan Lokasi SPDN 	<ul style="list-style-type: none"> • 7315 KL BBM dan 1099 Tabung LPG 3 kg • 6 SK HET BBM dan LPG • 2 Usulan Lokasi SPDN 	87 % BBM 70 % LPG 100 % 100 %
Terlaksananya Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Persyaratan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Benar atau Good Mining Practice (GMP)	Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Kaidah Teknis GMP	1.007 IUP yang memenuhi CNC	429 IUP yang memenuhi CNC	42,60 %

A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah serta Capaian Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016.

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Sumberdaya Lokal.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis 1 ini adalah meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) sektor Pertambangan dan Energi untuk tahun 2016. Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) program yaitu : (1) Program Pembinaan dan pelayanan Perizinan; dan (2) Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium.

- a. Hasil capaian target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 yang bersumber dari retribusi biaya cetak peta dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa peralatan laboratorium dan alat survey) yaitu mencapai 100,03 % atau berjumlah sebesar Rp. 420.140.000,- sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.2
TARGET DAN PENCAPAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2016

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 420.000.000,-	Rp. 420.140.000,-	100,03 %

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015 maka PAD tahun 2016 mengalami peningkatan atau kenaikan seperti terlihat dalam tabel dan grafik pencapaian PAD berikut ini :

TABEL 3.3
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PERTAMBANGAN
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan	Tahun 2015	Tahun 2016
Target	Rp. 366.750.000	Rp. 420.000.000,-
Realisasi	Rp. 369.245.000	Rp. 420.140.000,-
Capaian	100,68 %	100,03 %

Meningkatnya penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang pertambangan ini merupakan kontribusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium.

- b. Hasil capaian target untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan tahun 2016 realisasinya dalam jumlah rupiah yaitu sebesar Rp. 670.911.179.308,- atau mencapai sekitar 40,66 %, yang bersumber dari Iuran Tetap sebesar Rp. 43.220.931.473,- dan Royalty sebesar Rp. 627.690.247.835,- Realisasi PNBP ini tidak mencapai target yang ditetapkan seperti yang terlihat dalam tabel dan grafik dibawah ini :

TABEL 3.4
TARGET DAN PENCAPAIAN PNBP SUB SEKTOR MINERBA
TAHUN 2016

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba			
<ul style="list-style-type: none"> • Iuran Tetap • Royalty 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 202.847.950.499,78 • Rp. 1.447.177.660.086,64 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 43.220.931.473 • Rp. 627.690.247.835 	<ul style="list-style-type: none"> 21,37 % 43,37 %
	Rp. 1.650.025.610.586,42	Rp. 670.911.179.308	40,66 %

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015 maka PNBP tahun 2016 mengalami penurunan seperti terlihat dalam tabel perbandingan pencapaian PNBP berikut ini :

TABEL 3.5
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN PNBP SEKTOR
PERTAMBANGAN TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Tahun 2015	Tahun 2016
Target	1.108.185.592.190	Rp. 1.650.025.610.586,42
Realisasi	498.000.433.759	Rp. 670.911.179.308
Capaian	44,95 %	40,66 %

Tidak tercapainya target atau menurunnya penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang pertambangan ini disebabkan faktor-faktor antara lain:

- (1) Target PNBP yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu tinggi;
- (2) Rendahnya harga jual komoditas, khususnya batu bara;
- (3) Adanya kebijakan pusat untuk produksi /ekspor logam tidak boleh raw material;
- (4) Pemegang IUP sebagian besar masih belum melakukan kewajiban pembayaran Iuran Tetap.

Dengan tidak tercapainya target PNBP sektor pertambangan, ini menyebabkan menurun Pendapatan Negara yang bersumber dari sektor pertambangan mineral dan batubara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Padahal Sektor Pertambangan merupakan salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kalimantan Tengah selain sektor perkebunan dan perdagangan. Karena itu, solusi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk pencapaian target PNBP pada tahun berikutnya adalah dengan menetapkan target PNBP yang wajar serta lebih pro aktif/intesif dalam mengingatkan dan menagih para pemegang IUP untuk membayar kewajiban secara tertib dan tepat waktu.

2. Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Bagi Masyarakat.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis 2 ini adalah : Meningkatnya Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS tersebar dan PLTS terpusat), Jumlah Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa, Jumlah FS dan DED bersumber dari Energi Baru Terbarukan, dan Jumlah Terbangunan Informasi Biogas.

Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program yaitu : (1) Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi; (2) Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; dan (3) Program Pengusahaan Listrik dan Energi.

- a. Hasil capaian target untuk listrik perdesaan di Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2016 untuk PLTS tersebar adalah 22 (dua puluh dua) desa atau mencapai sekitar 100 % dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016, yaitu 22 (dua puluh dua) desa. Sedangkan hasil capaian target listrik perdesaan di Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2016 untuk PLTS terpusat adalah 3 desa yang juga mencapai target kinerja.
- b. Hasil capai target jumlah peta informasi pembangunan listrik desa pada tahun anggaran 2016 adalah 6 (enam) peta atau mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. Sedangkan hasil capaian target FS dan DED bersumber dari energi baru terbarukan adalah 2 (dua) dokumen atau mencapai 100 % dari target yang ditetapkan.
- c. Hasil capai target Terbangunannya Informasi Biogas pada tahun 2016 adalah 1 paket atau mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan.

TABEL 3.6
TARGET DAN PENCAPAIAN LISTRIK PERDESAAN TAHUN 2016

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)
• Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS Tersebar)	• 22 Desa	• 22 Desa	100 %
• Jumlah Listrik Perdesaan (PLTS Terpusat)	• 3 Desa	• 3 Desa	100 %
• Jumlah Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa	• 6 Peta	• 6 Peta	100 %
• Jumlah FS dan DED Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	• 2 Dokumen	• 2 Dokumen	100 %
• Jumlah Terbangunannya Informasi Biogas	• 1 Paket	• 1 Paket	100 %

Adapun rincian pelaksanaan pembangunan listrik desa bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2016 Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Kalimantan Tengah telah membangun PLTS tersebar type Sehen yang tersebar di sebelas Kabupaten dengan jumlah 2.072 unit yaitu Kabupaten Lamandau sebanyak 233 unit, Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 262 unit, Kabupaten Barito Utara sebanyak 515 unit, Kabupaten Barito Selatan sebanyak 212 unit, Kabupaten Murung Raya sebanyak 202 unit, Kabupaten Katingan sebanyak 281 unit, Kabupaten Kapuas sebanyak 120 unit, Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 69 unit, dan Kabupaten Seruyan sebanyak 178 unit. Sementara dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2016 dibangun PLTS terpusat pada 2 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Pulang Pisau di 2 lokasi dengan kapasitas daya 10 kWp di Desa Manen Kaleka dengan

jumlah 63 pelanggan dan kapasitas daya 18 kWp di Desa Simpur dengan jumlah pelanggan 112 pelanggan. Sedangkan Kabupaten Barito Selatan dengan kapasitas daya 20 kWp di Desa Janggi dengan jumlah pelanggan 90 pelanggan.

Manfaat yang di dapat masyarakat pedesaan melalui pemasangan PLTS tersebar dan terpusat ini dari segi lingkungan adalah selalu tersedianya penerangan yang bersumber dari energi yang terbarukan, karena pada dasarnya PLTS menggunakan sinar matahari dimana sinar matahari merupakan energi yang terbarukan tidak akan pernah habis, sehingga tidak menyebabkan krisis karena kelangkaan energi. Selain itu, tenaga surya merupakan energi yang bersih dan ramah lingkungan, karena tidak memancarkan emisi karbon berbahaya yang berkontribusi terhadap perubahan iklim seperti pada bahan bakar fosil. Sedangkan manfaat PLTS dari sisi ekonomi adalah bahwa energi matahari sebagai salah satu energi alternatif tidak perlu dibeli, hanya membutuhkan biaya pemasangan awal yang selanjutnya dapat berjalan dengan sendirinya. Dengan lain, hemat karena tidak memerlukan bahan bakar. Dengan adanya penerangan melalui pemasangan PLTS ini sangat membantu masyarakat pedesaan dalam aktivitas sehari-hari terutama di malam hari. Manfaat ini sesuai dengan program "Kalimantan Tengah Terang" yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2014.

Sampai dengan akhir tahun 2016 total desa yang telah berlistrik adalah sebanyak 1.300 desa dengan jumlah Rumah Tangga (RT) berlistrik adalah sebanyak 490.949, baik dari PLN dan Non PLN. Sedangkan sisa desa yang belum teraliri listrik sebanyak 273 desa atau 156.139 rumah tangga. Semenetera itu kondisi rasio elektrifikasi di Kalimantan Tengah per desember 2016 telah mencapai 75,9 % dan rasio desa berlistri 82,6 % dari jumlah desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1573 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 647.088. Karena itu, untuk desa-desa dan rumah tangga-rumah tangga yang belum teraliri listrik sampai dengan akhir tahun 2016. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tetap melanjutkan untuk penyelesaian target desa berlistrik sebanyak 1573 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 647.088 tersebut.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Investasi Sektor Pertambangan dan Energi

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis 3 ini adalah meningkatnya nilai investasi berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pemegang IUP bidang pertambangan dan energi. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) yaitu : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Kegiatan yang

dilaksanakan dalam program ini adalah pelaksanaan pameran dagang dan promosi yang capaian target kinerjanya mencapai 100 %. Melalui pameran dagang dan promosi ini disediakan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi tentang sumber energi baru terbarukan, sumber daya mineral, batubara dan air tanah. sehingga meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas dalam rangka meningkatkan investor sektor pertambangan dan energi.

Pada tahun 2016 hasil capaian target nilai investasi berdasarkan RKAB pemegang IUP sektor pertambangan dan energi mencapai Rp. 103.640.561.877,- atau 4,7 % dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 2.208.422.989.681,- dan Us \$ 15.008.392 atau 18,15 % dari target Us \$ 82.565.015 seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 3.7
CAPAIAN NILAI INVESTASI BERDASARKAN RKAB TAHUN 2016

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)
<ul style="list-style-type: none"> Persentase Nilai Investasi Meningkat Berdasarkan RKAB 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 2.208.422.989.681,- Us \$ 82.565.015 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 103.640.561.877,- Us \$ 15.008.392 	<ul style="list-style-type: none"> 4,7 % 18,15 %

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015 maka nilai investasi berdasarkan RKAB tahun 2016 mengalami penurunan seperti terlihat dalam tabel perbandingan pencapaian PNPB berikut ini :

TABEL 3.8
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN NILAI INVESTASI BERDASARKAN RKAB TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Persentase Nilai Investasi Meningkat Berdasarkan RKAB	Tahun 2015	Tahun 2016
Target	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 280.000.000.000,- Us \$ 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 2.208.422.989.681,- Us \$ 82.565.015
Realisasi	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 188.813.914.573,- Us \$ 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 103.640.561.877,- Us \$ 15.008.392
Capaian	<ul style="list-style-type: none"> 67,43 % 18,15 % 	<ul style="list-style-type: none"> 4,7 % 18,15 %

Tidak tercapainya target tersebut bukan berarti menurunnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi hal ini disebabkan belum semua IUP menyampaikan laporan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB). Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) adalah untuk memantau serta mengawasi anggaran biaya perusahaan dalam melaksanakan eksplorasi dan produksi. Karena itu, solusi yang ditempuh oleh Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi Kalimantan Tengah adalah memberikan peringatan kepada Pemegang IUP untuk segera menyerahkan laporan RKAB tahun 2016.

4. Sasaran Strategis 4 : Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Bahan Bakar Minyak dan Gas

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis 4 ini adalah : Jumlah kuota BBM dan LPG 3 kg, Jumlah SK HET BBM dan LPG, dan Jumlah Lokasi SPDN. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) yaitu : Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas.

- a. Hasil capaian target pada tahun anggaran 2016 untuk kuota BBM dan LPG 3 kg adalah tersalurkannya kepada masyarakat 17649 KL BBM atau 112.24 % dari target yang ditetapkan yaitu 15725 KL BBM dan 387520 tabung LPG 3 kg atau 880.47 % dari target yang ditetapkan yaitu 44013 Tabung LPG 3 kg. Target jumlah kuota BBM dan LPG 3 kg bersubsidi tersebut berdasarkan atas usulan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (BPH Migas), berdasarkan data kebutuhan BBM dan LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten/kota. Sedangkan capaian realisasi berdasarkan jumlah pemakaian/penggunaan BBM bersubsidi BBM dan LPG 3 kg. yang dikonsumsi untuk kebutuhan masyarakat diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Hasil capaian target pada tahun anggaran 2016 untuk jumlah SK HET BBM dan LPG yang diterbitkan oleh pada tahun 2016 ini sebanyak 6 Usulan SK dan mencapai target yang ditetapkan. Demikian juga usulan Lokasi 2 SPDN yang diusulkan mencapai target yang ditetapkan.

Adapun realisasi dan capaian kebutuhan masyarakat akan BBM dan Gas pada tahun 2016 adalah dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.9
REALISASI DAN CAPAIAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
AKAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS TAHUN 2016

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kuota BBM dan LPG 3 kg • Jumlah SK HET BBM dan LPG • Jumlah Lokasi SPDN 	<ul style="list-style-type: none"> • 15725 KL BBM dan 44013 Tabung LPG 3 kg • 6 SK HET BBM dan LPG • 2 Usulan Lokasi SPDN 	<ul style="list-style-type: none"> • 17649 KL BBM dan 387520 Tabung LPG 3 kg • 6 SK HET BBM dan LPG • 2 Usulan Lokasi SPDN 	112.24 % BBM 880.47 % LPG 100 % 100 %

Berdasarkan capaian yang terlihat dalam tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa dalam tahun 2016 jumlah terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg bersubsidi untuk masyarakat Kalimantan Tengah telah tercapai. Program konversi minyak tanah ke elpiji menjadi alasan Kementerian ESDM untuk

meningkatkan alokasi volume penyediaan elpiji tabung 3 Kg tersebut, dengan pertambahan volume tersebut diharapkan penggunaan minyak tanah bagi kebutuhan rumah tangga juga akan menurun. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan makin bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya di Kalimantan Tengah dan semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat, membuat kebutuhan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak dan gas setiap tahunnya juga makin meningkat, seiring dengan penambahan kuota tiap tahunnya dari Pemerintah Pusat (BPH Migas) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Tengah.

5. Sasaran Strategis 5 : Terlaksananya Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Persyaratan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Benar atau Good Mining Practice (GMP)

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis 4 ini adalah Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Kaidah Teknis GMP. Sasaran ini dicapai melalui 5 (lima) program, yaitu : (1) Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan; (2) Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan; (3) Peningkatan Informasi Bidang Geologi; (4) Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi; (5) Monitoring dan Evaluasi Program.

Jumlah pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1007 IUP. Jumlah tersebut diluar dari Pemegang PKP2B sebanyak 15 perusahaan, Pemegang Kontrak Karya (KK) sebanyak 5 perusahaan, Pemegang Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sebanyak 112; Pemegang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebanyak 207, yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, seperti tabel dibawah ini:

**TABEL 3.10
PERIZINAN MINERAL DAN BATUBARA**

Jenis Perizinan Minerba	Jumlah	Kewenangan
Kontrak Karya (KK)	5	Pemerintah Pusat
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	15	Pemerintah Pusat
Ijin Usaha Pertambangan (IUP)	1.007	Pemerintah Provinsi
Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)	112	Pemerintah Provinsi

Sedangkan untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebanyak 207 tidak termasuk dalam jenis perizinan Minerba melainkan wilayah pertambangan dimana

kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan sesuai Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009.

Terhadap 1.007 Pemegang IUP tersebut Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pembinaan, bimbingan teknis masalah pertambangan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pertambangan. Secara khusus Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Audit Legalitas dan Kepatuhan Pengelolaan Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah. Dari hasil Audit Legalitas dan Kepatuhan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang berjumlah 1.007 tersebut, sebanyak 429 pemegang IUP dinyatakan memenuhi kriteria verifikasi CNC (Clear and Clean). Adapun tata cara dan proses pelaksanaan CNC tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan penjelasan di atas hasil capaian target pada tahun anggaran 2016 untuk Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Kaidah Teknis GMP adalah sebanyak 429 pemegang IUP atau 42,6 % dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.007 pemegang IUP seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL 3.11
CAPAIAN SASARAN PERSENTASE PELAKU USAHA KEGIATAN
PERTAMBANGAN MINERBA YANG MEMENUHI KAIDAH GMP
PADA TAHUN 2016**

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)
Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Kaidah Teknis GMP	1.007 IUP CNC	429 IUP CNC	42,60 %

Jika diperhatikan dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah IUP pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat pada tahun 2016 sebanyak 1.007 IUP dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah sebanyak 966 IUP seperti tabel berikut ini:

**TABEL 3.12
TABEL PERBANDINGAN IUP TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016**

Jenis Perijinan	TAHUN 2015	TAHUN 2016	Persentase
Ijin Usaha Pertambangan (IUP)	966	1.007	4,24 %

Meningkatnya IUP tersebut dikarenakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, namun hal itu juga menunjukkan bahwa minat investasi di sektor pertambangan di Kalimantan Tengah makin meningkat. Peningkatan ini tentunya akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak pemegang IUP maupun pendapatan dari perusahaan baik itu royalty, iuran tetap dan yang lainnya hasil dari pengelolaan usaha pertambangan. Selain itu, meningkatnya jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kalimantan Tengah, ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Namun disisi lainnya, dilihat dari hasil capaian sasaran persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan minerba yang memenuhi kaidah GMP pada tahun 2016 hanya sebanyak 429 pemegang IUP yang memenuhi kriteria CNC Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dari 1.007 Pemegang IUP yang ada di Kalimantan Tengah. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kepatuhan dari para pemegang IUP. Karena itu terkait kurangnya kepatuhan para pemegang IUP tersebut, maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah akan terus melakukan pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi kepada para pemegang IUP tersebut.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 memperoleh anggaran dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan total sebesar Rp. 35.044.084.524,- terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 25.943.981.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.100.103.524,- seperti dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.13
ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Langsung	25.943.981.000
2.	Belanja Tidak Langsung	9.100.103.524
Jumlah Keseluruhan		35.044.084.524

Pelaksanaan program dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana APBD tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 35.044.084.524,- dengan realisasi keuangannya

mencapai sebesar Rp 33.909.271.979,- atau sebesar 96,76 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

C. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2016

Capaian realisasi keuangan dalam setiap sasaran untuk program dan kegiatan prioritas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL. 3.14
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM
SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BERDASARKAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2016

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Capaian (%)	Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal	13. Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan.	167.838.500,00	145.088.500,00	86,44	100
	14. Peningkatan Kapasitas Laboratorium.	381.000.000,00	379.750.000,00	99,67	100
2. Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat	15. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.	18.687.858.700,00	18.138.988.156,00	97,06	100
	16. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.	18.920.000,00	18.920.000,00	100	100
	17. Pengusahaan Listrik dan Energi	225.000.000,00	185.984.500,00	82,65	100
3. Meningkatnya investasi sektor pertambangan dan energi	18. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	138.071.000,00	138.071.000,00	100	100
4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak dan gas	19. Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas.	323.601.000,00	316.301.000,00	97,74	100
5. Terlaksananya kegiatan Pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknis pertambangan	20. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan.	351.000.000,00	327.010.000,00	93,16	100
	21. Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan.	144.000.000,00	127.360.000,00	88,44	100

yang baik dan benar atau good Mining Practice (GMP)	22. Peningkatan Informasi Bidang Geologi.	406.030.000,00	388.414.600,00	95,66	100
	23. Peningkatan Kualitas aan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara,Migas dan Panas Bumi.	336.611.000,-	309.119.000,00	91,83	100
	24. Monitoring dan evaluasi program.	156.000.000,00	146.028.648,00	93,60	100

Bab 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, khususnya pada tahun anggaran 2016. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan sektor pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sejalan dengan falsafah "Huma Betang".

Walaupun masih ada kendala maupun hambatan dalam pelaksanaannya, namun secara umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan telah mencapai hasil kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam setiap sasaran strategis pada tahun anggaran 2016. Hasil capaian kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan *good government* dan *clean goverment* yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2016.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu antara lain keterbatasan dana maupun anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2016, terutama adanya rasionalisasi anggaran mempengaruhi dari hasil capaian kinerja khususnya dalam sektor pertambangan dan energi. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pelayanan publik, sehingga kegiatan pembangunan hanya terbatas pada dana yang sudah dianggarkan, sedangkan masih banyak kegiatan yang diusulkan belum ada solusi penyelesaian dana maupun anggarannya.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan sesuai kebijakan figur seorang pemimpin daerah yang baru, dan ini juga berpengaruh dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya di sektor pertambangan dan energi. Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya Dinas Pertambangan dan

Energi Provinsi Kalimantan Tengah hasil capaian kinerja pada tahun anggaran 2016 ini sudah mencapai target.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada tahun 2017 pemerintah diharapkan dapat menyediakan anggaran yang dipergunakan untuk percepatan pencapaian target Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan energi serta Program Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Ijin Usaha Pertambangan yang menerapkan Good Mining Practice (GMP).

D. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2017 kebijakan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Pelibatan stakeholder dalam perencanaan dan penetapan arah kebijakan pembangunan bidang pertambangan dan energi serta melalui pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat;
2. Peningkatan SDM aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelatihan-pelatihan dan Kursus-kursus;
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan, melalui berbagai pertemuan, rapat koordinasi baik dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menangani sektor Pertambangan dan Energi;
4. Untuk merealisasikan supaya target pada tahun 2017 semua desa di Kalimantan Tengah dapat menikmati penerangan listrik serta Ijin Usaha Pertambangan yang menerapkan *Good Mining Practice* (GMP) maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat sulit terealisasi karena masih membutuhkan dana yang cukup besar.
5. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pembangunan pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan *Good Mining Practice* (GMP) serta peningkatan pemakaian Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat semakin terwujud untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.